

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anggaran belanja pemerintah daerah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja bangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penguasaan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang – undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam era globalisasi. Sebagaimana dalam penjelasan umum undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing – masing. Dengan berlakunya undang – undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga anggaran berbasis kinerja (ABK).

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan – kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan yang dituangkan dalam target kinerja setiap unit kerja. Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program kegiatan, klasifikasi belanja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta kolerasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Demikian juga sumber daya yang cukup untuk peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja berupa adanya upaya penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja masih belum terselenggara secara berkelanjutan dalam upaya perbaikan penganggaran berbasis kinerja. Pengelola keuangan daerah, dalam aspek operasionalnya yang tetap mengacu kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal tersebut memang telah diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 129 dan 130 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelola keuangan daerah kepada pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan tersebut meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian batasan masalah diatas, maka penulis membuat perumusan masalah yaitu : (1) Sistem anggaran kinerja, (2) anggaran pendapatan, (3) anggaran belanja daerah..

## **C. Tujuan Studi Literatur**

Tujuan dari Studi Literatur ini adalah untuk mengetahui apakah penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## **D. Manfaat Studi Literatur**

Manfaat Studi Literatur ini memberikan manfaat bagi penulis, yang dapat mengetahui sejauhmana pengaruh anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, akademisi studi literatur ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan pengetahuan dibidang Akuntansi khususnya mengenai pendapatan anggaran sistem kinerja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah didalam membuat kebijakan dan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.